

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN PANTAI CERMIN**

KABUPATEN SOLOK

TESIS



**YANGGA PANGESTU
2010018312003**

**Tesis Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Teknik Sipil**

**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN PANTAI CERMIN
KABUPATEN SOLOK

Oleh :

YANGGA PANGESTU
NPM. 2010018312003

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2023

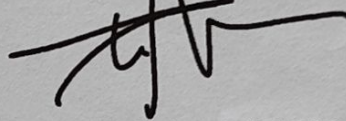
Tim Penguji

Ketua,



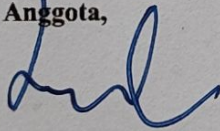
Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T, M.T

Sekretaris,



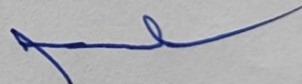
Dr. Rini Mulyani, S.T, M.Sc (Eng)

Anggota,



Dr. Eng. Khadavi, S.T, M.T

Anggota,



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Teknik Sipil

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Dekan



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN PANTAI CERMIN
KABUPATEN SOLOK**

Oleh :

YANGGA PANGESTU
NPM. 2010018312003

**Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2023**

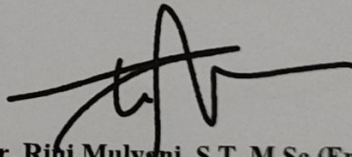
Menyetujui

Pembimbing I,



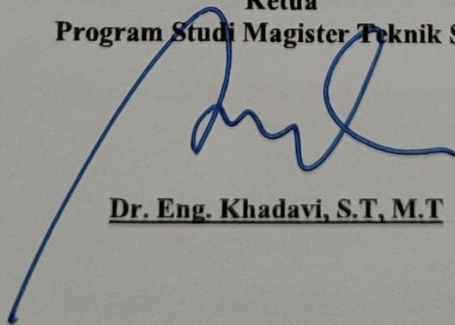
Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T, M.T

Pembimbing II



Dr. Rihni Mulyani, S.T, M.Sc (Eng)

**Ketua
Program Studi Magister Teknik Sipil**



Dr. Eng. Khadavi, S.T, M.T

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Memiliki rumah yang layak dapat melindungi seseorang atau sekelompok orang dari segala macam bahaya. Namun masih banyak kondisi masyarakat yang hidup kurang sejahtera sehingga sulit untuk dapat membuat rumah yang layak huni, rumah layak huni seperti yang dimaksudkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program BPS meliputi: 1) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding, 2) kecukupan minimum luas bangunan 3) akses sanitasi 4) akses air minum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 3. Keputusan No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat adalah pembangunan dan pembangunan perumahan dan permukiman yang tujuan utamanya adalah menyiapkan perumahan yang sejahtera dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Sebagai badan pengambil keputusan, pemerintah telah mengembangkan program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya mengembangkan

program yang terfokus pada bantuan stimulus ekonomi dan bisnis, namun realisasi perumahan yang layak bagi masyarakat miskin tidak luput dari perhatian pemerintah, salah satunya adalah program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS).

BSPS merupakan salah satu penjabaran dari kebijakan nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014, dan pembangunan perumahan dan pemukiman masih menghadapi tiga masalah utama, yaitu: 1) ketersediaan perumahan yang terbatas, 2) peningkatan hunian tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat serta prasarana, sarana lingkungan dan penunjang utilitas, dan 3) semakin maraknya permukiman kumuh. Tujuan program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2018. Pedoman No. 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya dirancang untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2006, program ini diberi nama Bantuan Stimulus Pembangunan Perumahan Mandiri (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), dan dijalankan oleh Departemen Perumahan Rakyat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2016, yang menyatakan dalam pasal Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, BSPS adalah bantuan pemerintah dalam bentuk stimulus terhadap masyarakat yang berpendapatan Rendah untuk meningkatkan swasembada untuk pengembangan/perbaikan Kualitas rumah dan infrastruktur, fasilitas dan utilitasnya. terdaftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang memiliki daya beli terbatas dan

karena itu membutuhkan dukungan Pemerintah untuk mendapatkan perumahan yang layak. Agar program bantuan stimulan perumahan swadaya ini dapat berjalan dengan lancar maka komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini harus berjalan dengan baik, Inggriani and Rusli (2015) menerangkan bahwa program BSPS di Kabupaten Dharmasraya kurang berjalan dengan lancar karena kurangnya komunikasi antara Kementrian Perumahan Rakyat dengan pihak Kabupaten penerima bantuan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati program ini karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perumahan, seperti pada penelitian Dharma and Bangun (2022) yang menyebutkan adanya masyarakat yang tidak bisa ikut program ini karena tidak memiliki sertifikat tanah dikarenakan rumah dan tanah yang ditempati diperoleh secara turun temurun. Masalah waktu pelaksanaan dan material juga sering menjadi penyebab keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, Ardiyanti and Widjonarko (2017) mengatakan material sempat terlambat antara 1 – 6 minggu dari waktu yang telah disepakati sehingga terjadi keterlambatan dalam waktu pelaksanaan.

Kecamatan pantai cermin dengan luas 366 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 22.281 jiwa yang didominasi oleh penduduk dengan pekerjaan sebagai petani (BPS, 2021). Banyak keluarga yang bisa dikategorikan kedalam masyarakat berpenghasilan rendah sehingga banyak yang masih tinggal dirumah yang bisa dikatakan tidak layak huni, seperti struktur rumah yang masih tidak mempunyai pondasi, kolom yang tidak ada, dinding yang masih terbuat dari kayu yang hanya dipakukan diantara pertemuan sudut kolom, tidak adanya MCK, luas

bangunan yang kurang dari standar rumah layak huni, maka perlu dilaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) agar masyarakat dapat tinggal dirumah yang layak huni. Seperti dapat dilihat pada gambar dibawah ini bahwa rumah yang ditempati masyarakat rumah semi permanen, tidak adanya MCK, ruang yang sempit.



Gambar 1. 1 Eksisting rumah masyarakat penerima bantuan bsp



Gambar 1. 2 Rumah dengan struktur bangunan, pencahayaan, sanitasi yang sangat tidak memadai



Gambar 1. 3 Rumah dengan luas bangunan yang kurang memadai

1.1 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan masalah guna membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana penerapan petunjuk teknis (juknis) yang telah dibuat oleh pemerintah pada program BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok ?
3. Bagaimana meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BSPS agar dapat sesuai dengan pedoman petunjuk teknis kegiatan BSPS yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
3. Merekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program BSPS

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat lebih terfokus seperti yang telah dijabarkan pada pendahuluan maka penelitian dibatasi kepada :

1. Standar yang dipakai untuk pedoman penelitian adalah Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS yang dibatasi tentang standar rumah layak huni yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.
2. Wilayah penelitian berada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yang terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu Nagari Surian dan Nagari Lolo.
3. Obyek penelitian adalah rumah sederhana yang dibangun melalui Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPS) Tahun Anggaran 2023.
4. Analisa menggunakan alat bantu software Microsoft Excel

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana meningkatkan efektifitas pelaksanaan program BSPS agar sesuai dengan pedoman peunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menerapkan standar bangunan tahan gempa bagi penerima bantuan BSPS.
3. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan bab – bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian serta hipotesis yang menjadi jawaban sementara terhadap permasalahan pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas hal – hal yang berhubungan dengan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan diagram alir penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan guna memperoleh kesimpulan dari pemecahan masalah penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran – saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian agar bisa menajdi lebih baik